



**MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

NOMOR 25 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN
AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pembangunan agraria dan tata ruang Tahun 2015-2019 berpedoman kepada Rencana Panjang Jangka Mengengah (RPJM), Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
- b. bahwa penyusunan Renstra Tahun 2015-2019 menggunakan data sebelum restrukturisasi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional sehingga perlu dilakukan penyesuaian kebijakan bidang pertanahan dan tata ruang sesuai dengan hasil evaluasi dan arahan Presiden Republik Indonesia;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2015-2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

7. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
10. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 21);
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 860);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 694);
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2015-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 25 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL TAHUN 2015-2019.

Pasal I

Lampiran II Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 25 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Tahun 2015-2019 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Februari 2019

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

ttd.

SOFYAN A. DJALIL

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 292

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 NOMOR 2 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN
 TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
 NOMOR 25 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS
 KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN
 PERTANAHAN NASIONAL TAHUN 2015-2019

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Target					Alokasi Anggaran					Unit Organisasi Pelaksana
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
Sasaran Strategis	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan agraria yang adil dan berkelanjutan						202.114	995.537	1.789.405	1.811.078	2.801.420	Direktorat Jenderal: (1)Penataan Agraria (2)Hubungan Hukum Keagrariaan
	Persentase Pencapaian Penataan ulang ketimpangan penguasaan pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	10,00%	10,00%	10,00%	22,25%	25,00%						
Sasaran Strategis	Terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan						920.189	570.639	165.737	445.714	2.355.292	Direktorat Jenderal : (1)Tata Ruang (2)Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
	Persentase Peningkatan kesesuaian Rencana program Pembangunan sektor dengan rencana tata ruang	10,00%	20,00%	25,00%	30,00%	40,00%						
	Persentase Peningkatan tertib tata ruang dan penguasaan tanah	30,00%	40,00%	50,00%	55,00%	60,00%						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Target					Alokasi Anggaran					Unit Organisasi Pelaksana
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
Sasaran Strategis	Berkurangnya kasus tata ruang dan pertanahan (sengketa, konflik, dan perkara)						4.332.225	5.443.440	6.847.133	9.547.957	13.095.372	Direktorat Jenderal : (1)Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah, (2)Tata Ruang, (3)Infrastruktur Keagrariaan, (4)Hubungan Hukum Keagrariaan (5)Pengadaan Tanah
	Persentase berkurangnya jumlah sengketa, konflik dan perkara bidang tata ruang dan pertanahan	10,00%	15,00%	20,00%	35,00%	50,00%						
	Persentase cakupan peta dasar pertanahan	30,00%	35,00%	40,00%	45,00%	50,00%						
	Persentase Jumlah Tanah Yang Terdaftar	30,00%	35,00%	40,00%	45,00%	50,00%						
	Jumlah						5.454.528	7.009.616	8.802.275	11.804.749	18.252.085	
Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang							527.282	347.476	74.330	220.906	1.267.500	Direktorat Jenderal: (1)Tata Ruang (2)Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
Sasaran Program	Terwujudnya Pelaksanaan Penyelenggaraan Penataan Ruang											
	Jumlah RTR Nasional/Pulau/Kepulauan/KSN	1	-	1	6	6						
	Jumlah operasionalisasi RTR Nasional/Pulau/Kepulauan/KSN	16	5	1	5	6						
	Jumlah Kawasan yang ditingkatkan kualitasnya	-	-	4	5	6						
	Jumlah forum masyarakat dan dunia usaha yang dibentuk atau mendapatkan fasilitasi pengembangannya dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan penataan kawasan	-	4	-	-	-						
Kegiatan 1	Kebijakan Teknis, Program dan Melaksanakan Monitoring Dan Evaluasi Kinerja						52.728	42.215	7.433	22.091	126.750	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Target					Alokasi Anggaran					Unit Organisasi Pelaksana
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
Sasaran Kegiatan 1	Tersedianya Kebijakan Teknis, Program dan Melaksanakan Monitoring Dan Evaluasi Kinerja (Dokumen)											
	Menyusun Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang (RENC, MANF) (Dok)	8	8	2	8	8						
	Menyusun Kebijakan Teknis, Program dan melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja (RENC, MANF, TAWAS, SET) (Dok)	3	3	3	3	3						
	Menyusun data dan informasi kebijakan serta pelaksanaan program (Dok)	1	1	1	1	1						
Kegiatan 2	Keterpaduan Program Pemanfaatan Ruang dan Harmonisasi peraturan perundangan sektoral Bidang Tata Ruang						105.456	69.124	14.866	44.181	253.500	
Sasaran Kegiatan 2	Keterpaduan program pemanfaatan ruang wilayah Nasional, Pulau/Kepulauan, dan KSN serta Pelaksanaan Kelembagaan Lintas Sektor dan Lintas Wilayah											Direktorat Jenderal: (1)Tata Ruang (2)Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
	Melakukan kajian dan menyusun rekomendasi harmonisasi peraturan perundangan sektoral yang berkaitan dengan Bidang Tata Ruang (SET)	1	1	1	1	1						
	Menyusun kajian dan perencanaan lintas sektor dan lintas wilayah (MANF)	5	5	1	5	5						
	Melaksanakan Koordinasi Pelaksanaan Kelembagaan Lintas Sektor dan Lintas Wilayah (MANF)	5	5	1	5	5						
	Melaksanakan Sinkronisasi Program Sektor dalam perwujudan RTR (MANF)	5	5	1	5	5						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Target					Alokasi Anggaran					Unit Organisasi Pelaksana
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Memetakan indikasi program RTR ke dalam program rencana pembangunan (MANF)	5	5	1	5	5						
	Melaksanakan penataan ruang KSN (MANF)	5	5	1	5	5						
Kegiatan 3	RTRWN, Rencana Pengelolaan Ruang Laut dan Udara yang terintegrasi dengan rencana tata ruang, RTR Pulau/Kepulauan, dan RTR KSN						184.549	120.968	26.016	77.317	443.625	Direktorat Jenderal: (1)Tata Ruang (2)Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
Sasaran Kegiatan 3	RTRWN, Rencana Pengelolaan Ruang Laut dan Udara yang terintegrasi dengan rencana tata ruang, RTR Pulau/Kepulauan, RTR dan KSN											
	Menyusun RTR Pulau/Kepulauan (RENC)	10	10	4	10	10						
	Menyusun RTRWN, Rencana Pengelolaan Ruang Laut dan Udara yang terintegrasi dengan rencana tata ruang, RTR Pulau/Kepulauan, dan RTR KSN (termasuk revisi RTR KSN Jabodetabekpunjur)	10	10	4	10	10						
	Menyusun RTR dan RDTR Kawasan perbatasan negara (RENC)	3	3	1	3	3						
Kegiatan 4	Kebijakan, strategi, dan implementasi perwujudan Pengembangan Kawasan						47.455	31.106	6.690	19.882	114.075	
Sasaran Kegiatan 4	Kebijakan, strategi, dan implementasi perwujudan Pengembangan Kawasan											
	Menyusun rencana pengembangan, perwujudan, dan pengelolaan penataan kawasan perkotaan dan perintisan kota-kota baru (TAWAS)	10	10	2	10	10						
	Menyusun rencana pengembangan, perwujudan, dan pengelolaan penataan kawasan perdesaan (TAWAS)	10	10	2	10	10						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Target					Alokasi Anggaran					Unit Organisasi Pelaksana
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Menyusun rencana pengembangan, perwujudan, dan pengelolaan penataan kawasan baru termasuk kawasan rawan bencana dan kawasan risiko perubahan iklim (TAWAS)	5	5	1	5	5						Direktorat Jenderal: (1)Tata Ruang (2)Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
	Menyusun rencana pengembangan, perwujudan, dan pengelolaan penataan kawasan ekonomi (TAWAS)	5	5	1	5	5						
Sasaran Program	Terwujudnya Penyelenggaraan Pembinaan Penataan Ruang daerah											
	Jumlah Provinsi/Kabupaten/Kota Yang Memperoleh Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Dan Pemanfaatan Ruang Daerah	33	33	33	33	33						
Kegiatan 1	Fasilitasi perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang daerah						79.092	51.843	11.150	33.136	190.125	
Sasaran Kegiatan 1	Provinsi/Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang daerah											
	Melaksanakan pembinaan teknis perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang daerah di Provinsi/Kabupaten/Kota (BINDA)	33	33	33	33	33						
	Memberikan Persetujuan Substansi dalam penyusunan RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota (BINDA)	33	33	33	33	33						
	Melaksanakan Pembinaan Pemenuhan SPM di Provinsi/Kabupaten/Kota/Perkotaan (BINDA)	33	33	33	33	33						
Kegiatan 2	Forum pemangku kepentingan dan kelompok masyarakat dalam perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang daerah						58.001	32.219	8.176	24.300	139.425	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Target					Alokasi Anggaran					Unit Organisasi Pelaksana
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
Sasaran Kegiatan 2	Forum masyarakat dan dunia usaha yang dibentuk atau mendapatkan fasilitasi dalam perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang daerah	10	10	1	10	10						Direktorat Jenderal: (1)Tata Ruang (2)Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
	Melaksanakan program kemitraan dengan forum masyarakat dan dunia usaha (BINDA)	10	10	1	10	10						
Program Pengembangan Infrastruktur Keagrariaan							318.458	197.000	623.269	3.744.424	5.644.834	Direktorat Jenderal: Infrastruktur Keagrariaan
Sasaran Program	Meningkatnya Kepastian Letak Dan Batas-Batas Bidang Tanah Dan Kepastian Angka Luasnya Yang Mendukung Proses Penegakan Hukum											
	Persentase Cakupan Bidang Tanah Yang Terpetakan	30,00%	35,00%	40,00%	45,00%	50,00%						
Kegiatan 1	Cakupan Wilayah Peta Dasar Pertanahan						259.430	204.670	258.681	1.766.642	2.836.384	
Sasaran Kegiatan 1	Peta Dasar Pertanahan											
	Skala 1:2500 (Ha)	14.985.000	8.490.000	10.845.000	13.795.000	18.535.000						
	Skala 1:1000 (Ha)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000						
	Pembuatan Peta Dasar untuk RDTR skala 1:5000	75 lokasi	75 lokasi	75 lokasi	75 lokasi	75 lokasi						
	Peta Batas Kawasan/Batas Wilayah	-	-	61.000 Km/Tugu	61.000 Km/Tugu	61.000 Km/Tugu						
Kegiatan 2	Peta Tematik											
Sasaran Kegiatan 2	Tersedainya Peta Tematik						59.028	249.552	364.588	1.977.782	2.808.450	
	Survei dan Pemetaan Tematik (Ha)	4.771.412	19.000.000	34.652.000	8.632.653	18.488.516						
	Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah, Obyek Ruang dan Perairan (Ha)	2.500.000	2.750.000	3.025.000	3.327.500	3.660.250						
	Peta Bidang Tanah Sertipikat	-	-	-	7.000.00	9.000.000						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Target					Alokasi Anggaran					Unit Organisasi Pelaksana
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
Program Penataan Hubungan Hukum Keagrariaan							1.317.960	1.845.824	2.784.438	1.519.565	2.388.468	Direktorat Jenderal: Hubungan Hukum Keagrariaan
Sasaran Program	Terwujudnya Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat Penerima Redistribusi dan Legalisasi Aset											
	Persentase Tanah dan Ruang Yang Terdaftar	40,00%	45,00%	50,00%	55,00%	60,00%						
	Jumlah Masyarakat Pemilik Sertipikat Yang Menerima Akses Reform	10%	10%	10%	10%	10%						
Kegiatan 1	Sertipikat Tanah yang diterbitkan											
Sasaran Kegiatan 1	Sertipikat Yang di Terbitkan											
	Pendaftaran Hak Atas Tanah	922.093	1.100.000	5.000.000	7.000.000	9.000.000						
Kegiatan 2	Akses ke Sumber-sumber Ekonomi Yang diberikan kepada Penerima Manfaat											
Sasaran Kegiatan 2	Penerima Manfaat											
	Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi	34 Provinsi						
Program Penataan Agraria							142.178	939.537	1.742.610	1.744.610	1.746.148	Direktorat Jenderal: Penataan Agraria
Sasaran Program	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pengaturan dan Penataan, Penguasaan, Pemilikan Tanah Serta Pemanfaatan dan Penggunaan Tanah Secara Optimal											
	Persentase Pencapaian Penataan Ulang Ketimpangan Penguasaan Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah	10%	10%	15%	15%	15%						
Kegiatan 1	Redistribusi Tanah						56.871	448.373	841.879	842.859	843.612	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Target					Alokasi Anggaran					Unit Organisasi Pelaksana
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
Sasaran Kegiatan 1	Bidang Tanah Yang didistribusi											Direktorat Jenderal: Penataan Agraria
	Pelaksanaan Redistribusi Tanah	107.150	975.000	975.000	1.000.000	1.000.000						
Kegiatan 2	Konsolidasi tanah						13.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
Sasaran Kegiatan 2	Bidang Tanah Yang di Konsolidasi											
	Pelaksanaan Konsolidasi Tanah	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500						
Kegiatan 3	Inventarisasi Tanah											
Sasaran Kegiatan 3	Inventarisasi Penguasaan Pemilikan Penguasaan dan Pemafaatan Tanah											
	Pelaksanaan IP4T (Bid)	144.900	4.515.360	4.515.360	4.515.360	4.515.360	72.307	479.164	888.731	889.751	890.535	
	Pelaksanaan Inventarisasi WP3WT (SP)	148	165	65	197	165						
	Penyusunan Neraca PGT(Kab/Kota)	58	105	70	92	105						
Program Pengadaan Tanah							59.936	56.000	46.795	66.468	1.055.273	Direktorat Jenderal: Pengadaan Tanah
Sasaran Program	Terwujudnya Pelaksanaan Pengadaan tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum											
	Tersedianya Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum											
Kegiatan 1	Pelaksanaan Pengadaan Tanah Instansi											
Sasaran Kegiatan 1	Tersedianya Informasi Nilai Tanah						29.968	31.224	42.695	53.300	53.300	
	Pembuatan peta zona nilai tanah	775.000	800.000	844.000	3.259.000	3.259.000						
	Pembuatan Peta Zona Nilai Ekonomi Kawasan	21.100	25.000	12.500	10.000	25.000						
	Menetapkan SK Hak Atas Tanah dan Hak Pengelolaan Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan BUMN/ BUMD	1	1	1	1	1						
Kegiatan 2	Lembaga Penyedia Tanah						28.170	-	-	-	1.000.000	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Target					Alokasi Anggaran					Unit Organisasi Pelaksana
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
Sasaran Kegiatan 2	Terbentuknya Lembaga Penyedia Tanah											Direktorat Jenderal: Pengadaan Tanah
	Pembentukan Lembaga Penyedia Tanah	-	-	-	1	1						
Kegiatan 3	Tanah untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum											
Sasaran Kegiatan 3	Cadangan tanah untuk kepentingan umum						1.798	24.776	4.100	13.168	1.973	
	Inventarisasi Tanah untuk kepentingan umum	1	1	1	1	1						
	Pembebasan tanah	-	-	-	-	1						
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan tanah							392.907	223.163	91.407	224.808	1.087.792	Direktorat Jenderal: Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
Sasaran Program 1	Pemanfaatan Ruang Yang Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang											
	Prosentase Implementasi Pengawasan Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota	20%	20%	20%	20%	20%						
	Jumlah Penindakan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang (Dok)	1	1	1	1	1						
Kegiatan 1	Implementasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota						216.099	91.000	14.215	20.834	598.286	
Sasaran Kegiatan 1	Implementasi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota											
	Melakukan Pengawasan Teknis, Pengawasan Khusus dan Pemenuhan SPM Penataan Ruang Provinsi/Kab/Kota	33 Prov	33 Prov	33 Prov	33 Prov	33 Prov						
	Melakukan Pembinaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota	33 Prov	33 Prov	33 Prov	33 Prov	33 Prov						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Target					Alokasi Anggaran					Unit Organisasi Pelaksana
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Melakukan Pengembangan Kelembagaan Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Pusat dan Daerah	33 Prov	33 Prov	33 Prov	33 Prov	33 Prov						Direktorat Jenderal: Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah
	Melakukan Monitoring Evaluasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang	33 Prov	33 Prov	33 Prov	33 Prov	33 Prov						
Kegiatan 2	Penindakan Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang						137.517	88.663	40.478	74.824	380.727	
Sasaran Kegiatan 2	Penindakan indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang											
	Melakukan Pulbaket dan Penyidikan terhadap Indikasi Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	10	10	2	20	20						
	Pengawasan langsung dan pengelolaan pengaduan	33 Prov	33 Prov	33 Prov	33 Prov	33 Prov						
Sasaran Program 2	Tertib Pemanfaatan Hak Atas Tanah dan Pendayagunaan Tanah Negara Bekas Tanah Terlantar											
	Jumlah Rekomendasi Hasil Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan	1	1	1	1	1						
	Jumlah Rekomendasi SK Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar	1	1	1	1	1						
Kegiatan 1	Rekomendasi Hasil Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan						43.220	13.000	20.000	81.791	119.657	
Sasaran Kegiatan 1	Rekomendasi Hasil Pengendalian dan Pemantauan Pertanahan											
	Menyusun data tanah pertanian dan tanah non pertanian yang dapat diolah dan dikelola	1	1	1	1	1						
	Menyusun Rekomendasi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Pemegang Hak Atas Tanah dan Dasar Penguasaan Atas Tanah	1	1	1	1	1						
Kegiatan 2	Rekomendasi SK Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar						35.362	30.500	16.714	47.359	97.901	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Target					Alokasi Anggaran					Unit Organisasi Pelaksana
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
	Terlaksananya Kegiatan Operasional dan Pelayanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional	33 Prov + 1Kantor Pusat	33 Prov + 1Kantor Pusat	33 Prov + 1Kantor Pusat	33 Prov + 1Kantor Pusat	33 Prov + 1Kantor Pusat						Sekretariat Jenderal
Kegiatan	Terlaksananya Kegiatan Operasional dan Pelayanan Kementerian ATR BPN						2.638.616	3.329.065	3.380.250	4.186.057	4.690.611	
Sasaran Kegiatan	Kegiatan Operasional dan Pelayanan Kementerian ATR BPN Berjalan Lancar dan Aman											
	Pelaksanaan Kegiatan Operasional dan Pelayanan Kementerian ATR BPN	33 Prov + 1Kantor Pusat	33 Prov + 1Kantor Pusat	33 Prov + 1Kantor Pusat	33 Prov + 1Kantor Pusat	33 Prov + 1Kantor Pusat						
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian ATR/BPN							10.000	12.000	12.000	13.417	25.000	Inspektorat Jenderal
Sasaran Program	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pelaksanaann Tugas pada Semua Unit Kerja Kementerian ATR/BPN											
	Presentase berkurangnya penyimpangan pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja Kementerian ATR/BPN	10%	10%	10%	10%	10%						
Kegiatan	Terlaksananya pengawasan internal di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional											
Sasaran Kegiatan	Pengawasan internal di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional						8.000	9.600	10.000	10.417	20.000	
	Pengawasan internal di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	33 Prov + 1Kantor Pusat	33 Prov + 1Kantor Pusat	33 Prov + 1Kantor Pusat	33 Prov + 1Kantor Pusat	33 Prov + 1Kantor Pusat						
Kegiatan	Terlaksananya pengawasan untuk tujuan tertentu di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional						2.000	2.400	2.000	3.000	5.000	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Target					Alokasi Anggaran					Unit Organisasi Pelaksana
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
Sasaran Kegiatan	Pengawasan untuk tujuan tertentu di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional											Inspektorat Jenderal
	Pengawasan untuk tujuan tertentu di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	33 Prov + 1Kantor Pusat	33 Prov + 1Kantor Pusat	33 Prov + 1Kantor Pusat	33 Prov + 1Kantor Pusat	33 Prov + 1Kantor Pusat						

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Februari 2019

MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

ttd.

SOFYAN A. DJALIL